

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai mengapa Korea Selatan membangun kerja sama pembangunan melalui program SP4N-LAPOR di Indonesia. Berdasarkan pembahasan Bab II hingga BAB IV, kerja sama tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari orientasi ODA Korea Selatan yang menekankan penguatan kapasitas institusional dan tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor *digital governance*. Dalam kerangka empat motif bantuan luar negeri menurut Carol Lancaster, temuan penelitian menunjukkan bahwa motif pembangunan merupakan motif yang paling dominan, disertai motif diplomatik yang cukup kuat, sementara motif komersial belum dapat ditegaskan sebagai motif dominan, dan motif kemanusiaan hadir secara terbatas dimensi inklusi dalam pelayanan publik.

Pertama, motif pembangunan terbukti paling konsisten dalam desain dan pelaksanaan program SP4N-LAPOR. Dukungan KOICA yang diimplementasikan bersama UNDP berorientasi pada *capacity development*, terlihat dari penguatan sistem penyusunan *roadmap*, pelatihan aparatur, pengembangan modul yang diperluas menjadi *e-learning*, serta pendampingan implementasi pada level subnasional. Secara *outcome*, program ini juga menunjukkan perbaikan pada aspek tata kelola layanan pengaduan, seperti perluasan keterhubungan pemerintah daerah dan percepatan proses penyelesaian pengaduan. Pola dukungan seperti ini selaras dengan pemahaman bantuan pembangunan yang tidak hanya menyalurkan sumber daya finansial, tetapi

juga memperkuat institusi, prosedur, dan kapasitas pelaksana agar layanan publik menjadi lebih responsif dan terukur.

Kedua, motif diplomatik dapat dibaca melalui skala komitmen dan pola keterlibatan kelembagaan Korea Selatan dalam kerja sama ini. Besarnya nilai hibah KOICA dan keterlibatan dalam tata kelola proyek menunjukkan bahwa kerja sama SP4N-LAPOR tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memperkuat hubungan antar pemerintah pada sektor tata kelola yang strategis. Dukungan pada sistem pengadaan nasional yang berkaitan dengan agenda akuntabilitas, partisipasi publik, dan perbaikan pelayanan publik memberi ruang bagi Korea Selatan untuk membangun reputasi dan posisi sebagai mitra pembangunan pada sektor digital governance di Indonesia. Dengan demikian, keuntungan bagi Korea Selatan yang paling jelas dalam penelitian ini terlihat kepada dimensi diplomatik berupa penguatan kemitraan dan posisi sebagai donor strategis di sektor tata kelola digital.

Ketiga, motif komersial tidak dapat dinyatakan dominan berdasarkan butki yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam indikator Lancaster, motif komersial cenderung tampak melalui mekanisme bantuan yang mengikat pengadaan (*tied aid*), skema kredit tertentu, atau desain program yang secara jelas mendorong pembelian barang/jasa dari pihak donor. Pada penelitian ini, analisis terutama didasarkan pada dokumen *Terminal Evaluation* proyek KOICA-UNDP SP4N-LAPOR, *Independent Country Programme Evaluation (ICPE) UNDP Indonesia, UNDP Annual Report 2023*, dan dokumen program terkait implementasi SP4N-LAPOR. Dari keseluruhan dokumen tersebut, tidak ditemukan penjelasan yang menunjukkan adanya mekanisme

bantuan yang mengikat pengadaan, skema kredit tertentu, maupun kewajiban penggunaan barang dan jasa dari pihak donor. Sebaliknya, dokumen lebih banyak menampilkan dukungan dalam bentuk penguatan kapasitas, pendampingan teknis, standarisasi tata kelola, dan perluasan partisipasi publik. dokumen utama di atas merupakan yang dianalisis, dukungan yang muncul lebih banyak berupa penguatan kapasitas, standarisasi tata kelola, serta penguatan partisipasi, tanpa penjelasan eksplisit mengenai pengadaan yang mengikat atau keterlibatan vendor tertentu dari Korea Selatan. Oleh karena itu motif komersial dalam kerja sama ini lebih tepat diposisikan sebagai motif yang belum terbukti dominan dan memerlukan bukti tambahan apabila ingin ditegaskan secara lebih kuat.

Keempat, motif kemanusiaan juga perlu ditempatkan secara proporsional. Mengarah ke definisi dari Lancaster, motif kemanusiaan berhubungan dengan bantuan *relief* pada situasi krisis/bencana. Program SP4N-LAPOR bukanlah program *relief*, sehingga tidak tepat jika diposisikan sebagai bantuan kemanusiaan dalam pengertian darurat. Namun, penelitian ini menemukan adanya dimensi kemanusiaan dalam arti yang lebih terbatas, yaitu perhatian pada inklusi kelompok rentan dan upaya dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pengaduan. Dimensi ini lebih tepat dibaca sebagai bagian dari agenda pembangunan layanan publik yang inklusif, bukan sebagai *humanitarian relief*.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama pembangunan Korea Selatan melalui program SP4N-LAPOR di Indonesia terutama didorong oleh motif pembangunan dengan dukungan kuat pada penguatan kapasitas

institusional dan tata kelola layanan publik berbasis digital. Di saat yang sama, terdapat dimensi diplomatik yang menunjukkan keuntungan bagi Korea Selatan dalam bentuk penguatan posisi dan kemitraan pada sektor tata kelola digital. Motif komersial belum dapat ditegaskan sebagai dominan karena keterbatasan bukti yang sesuai indikator Lancaster, sementara motif kemanusiaan hadir sebagai dimensi inklusi yang menyertai pembangunan layanan publik. Kesimpulan ini sekaligus menegaskan bahwa kebijakan bantuan luar negeri dapat mengandung kombinasi tujuan, akan tetapi pembobotannya masih condong terhadap bukti yang tersedia.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, untuk pengembangan kajian akademik, penelitian selanjutnya dapat memperkuat pembacaan motif komersial dengan menambahkan sumber data yang secara langsung membahas aspek pengadaan (*procurement*), kontrak penyedia, atau keterlibatan vendor/teknologi dalam proyek. Bukti semacam ini diperlukan agar indikator komersial menurut Lancaster dapat diuji lebih baik, sehingga motif komersial tidak bersifat indikatif. Selain itu, penelitian berikutnya dapat melakukan studi perbandingan terhadap program ODA Korea Selatan lain di sektor *digital governance*, baik di Indonesia maupun di negara lain, untuk menguji konsistensi pola motif yang ditemukan pada kasus SP4N-LAPOR.

Kedua, untuk saran praktis, Kementerian PANRB sebagai pengampu kebijakan dapat memperkuat keberlanjutan implementasi SP4N-LAPOR melalui penguatan kapasitas institusional di tingkat pelaksana, khususnya pada konsistensi

manajemen implementasi, integrasi lintas instansi, dan standardisasi prosedur tindak lanjut. Di saat yang sama, strategi peningkatan keterlibatan publik perlu terus diperkuat agar keterhubungan kelembagaan yang tinggi diikuti oleh peningkatan partisipasi pengguna. Bagi UNDP sebagai mitra pelaksana, penguatan *sustainability* pascaprojek dapat diarahkan pada penajaman monitoring dan evaluasi outcome serta memastikan bahwa praktik baik (*roadmap*, pelatihan, *e-learning*, dan rencana aksi) terinstitusionalisasi dalam rutinitas kerja instansi pusat dan daerah. Bagi KOICA sebagai donor utama, transparansi desain dukungan dan penguatan strategi keberlanjutan (*exit strategy*) dapat meningkatkan legitimasi program dan memperkuat posisi Korea Selatan sebagai mitra pembangunan pada sektor tata kelola digital, terutama dengan memastikan dukungan tidak berhenti pada output program tetapi menghasilkan perbaikan kapasitas institusional yang berkelanjutan.

